

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA EKS-KARESIDENAN MADIUN
TAHUN 2014-2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

DINI NUR RAHMAWATI

B200150388

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINEJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN MADIUN TAHUN 2014-2018**

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH:

DINI NUR RAHMAWATI

B200150388

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Eny Kusumawati, SE., M.M, Ak, CA

NIDN. 0623037101

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN MADIUN TAHUN 2014-2018.**

Oleh:

DINI NUR RAHMAWATI

B200150388

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 26 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Ery Kusumawati, S.E., M.M, Ak, CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Noer Sasongko, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli Tri Cahyono, MM, AK
(Anggota II Dewan Penguji)

()
.....
()
.....
()
.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Samsudin, M.M

NIDN 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Agustus 2019

Penulis



Dini Nur Rahmawati

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
EKS-KARESIDENAN MADIUN TAHUN 2014-2018**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Metode sampling menggunakan sampling jenuh dengan meneliti semua Laporan Keuangan berupa Laporan APBD Tahun 2014-2018 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, terdiri 5 kabupaten dan satu kota. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa Laporan APBD tahun 2014-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series*, *cross sectional*, dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan selama periode 2014-2018 tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun adalah rendah sekali. Tingkat efektivitas rata-rata efektif, tingkat efisiensi rata-rata efisien, tingkat keserasian rata-rata lebih besar digunakan untuk belanja operasi. Tingkat pertumbuhan PAD mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif, tingkat ketergantungan rata-rata pada tingkat sedang, dan tingkat kontribusi BUMD rata-rata menunjukkan memperoleh kontribusi yang cukup dari perusahaan daerah.

Kata Kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, pemerintah daerah

Abstract

This research aims to inspect the financial performance of local governments based on the analysis of regional financial ratios. The design of this research is quantitative descriptive research type. The population in this study is the Regency/City of the Ex-Residency of Madiun. The sampling of this research is using *saturated sampling* method that is sampling research all financial statements in the form of 2014-2018 APBD Report the Regency/City of the Ex-Residency of Madiun consist of 5 regencys and one city. The sample in this study is the financial statements in the form of 2014-2018 APBD Report. The analysis method used in this study are time series, cross sectional, and quantitative descriptive. The results showed that the level of independence of the Regency/City of the Ex-Residency of Madiun was very low. The average effectiveness level is effective, the average efficiency level is efficient, the greater average harmony level is used for operating expenditure. The PAD growth rate experienced a positive average growth rate, the average level of dependence at the moderate level, and the average BUMD contribution rate showed that it received sufficient contributions from the regional companies.

Keywords : financial ratio, financial performance, local governments

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya era baru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat, maju, serta dapat berkembang atau tidak, hal itu tergantung pada bagaimana cara suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Suatu otonomi daerah dikatakan berhasil tersebut tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, serta bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, Pasal 4).

Kemampuan suatu keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, sebab pemerintah daerah tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien dan efektif apabila tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan dari keuangan inilah dapat diketahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan suatu daerah di dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012: 212). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah tersebut sangat penting digunakan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan suatu daerah. Akuntabilitas tersebut bukan hanya sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, namun juga meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif artinya penggunaan dana tersebut harus mencapai target-target untuk kepentingan

publik. Efisien artinya menggunakan dana tersebut menghasilkan output yang maksimal. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013: 182).

Salah satu cara yang digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012), pengukuran kinerja Pemerintah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, antara lain Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD.

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal (Pemerintah Pusat) (Halim, 2012: 221-234). Rasio Efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah. Selanjutnya untuk rasio efisiensi yaitu menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Mardiasmo, 2013: 112).

Kemudian untuk Rasio Keserasian yaitu menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal (Halim, 2012: 221-234). Rasio Pertumbuhan PAD yang bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau tidak (Mahmudi, 2010: 138). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah. Yang terakhir

adalah Rasio Derajat Kontribusi BUMD yaitu menggambarkan seberapa besar tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

Penelitian ini mengacu hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldy H.R. Pengkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung (2017). Dalam penelitian tersebut, membahas tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan empat variabel yaitu pengukuran dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio ketergantungan daerah, rasio derajat kontribusi BUMD, serta obyek penelitiannya yang lebih luas yaitu Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dan periode nya pun berbeda yaitu tahun 2014-2018.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang dihitung berupa data Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun.

Sumber data penelitian ini adalah merupakan data sekunder dimana data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Metode sampling menggunakan sampling jenuh dengan meneliti semua Laporan Keuangan berupa Laporan APBD Tahun 2014-2018 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, terdiri 5 kabupaten dan satu kota.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 1. Rasio Kemandirian Daerah

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Daerah (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	8,757	9,219	9,473	13,762	11,902	10,623
Kota Madiun	14,340	16,909	17,353	24,081	23,071	19,151
Kabupaten Magetan	9,591	10,652	9,915	12,054	10,863	10,615
Kabupaten Ngawi	10,046	9,997	9,890	13,175	8,173	10,256
Kabupaten Pacitan	8,035	8,864	9,850	12,207	11,352	10,062
Kabupaten Ponorogo	11,657	11,286	11,848	13,887	13,005	12,337

Rata-rata rasio kemandirian daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun selama lima tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah rendah sekali karena tingkat rasio kemandirian antara 0% sampai 25% termasuk kategori pola hubungan bersifat instruktif. Yang dimaksud dengan pola hubungan instruktif yaitu Pemerintah Pusat memiliki peran yang dominan terhadap Pemerintah Daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3.2 Rasio Efektivitas

Tabel 2. Rasio Efektifitas

Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	120,832	116,283	108,052	135,150	117,278	119,519
Kota Madiun	156,968	147,856	130,808	144,741	117,513	139,577
Kabupaten Magetan	125,190	133,967	113,592	144,069	118,923	127,148
Kabupaten Ngawi	168,077	137,754	120,803	156,585	85,454	133,734
Kabupaten Pacitan	150,410	141,332	136,945	145,248	119,281	138,643
Kabupaten Ponorogo	155,111	118,871	112,877	136,593	125,783	129,847

Rasio efektivitas kabupaten/kota eks karesidenan Madiun tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami naik turun. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tingkat efektivitas berada pada tingkat sangat efektif yaitu rasio lebih dari 100%. Akan tetapi, Kabupaten Ngawi berbeda dengan kabupaten/kota eks karesidenan Madiun yang lain yaitu pada tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 85,454% yang artinya tingkat efektivitas berada pada tingkat kurang efektif.

3.3 Rasio Efisiensi

Tabel 3. Rasio Efisiensi

Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	94,781	97,418	106,182	119,279	92,591	102,050
Kota Madiun	90,938	90,071	103,334	131,730	102,610	103,737
Kabupaten Magetan	93,681	102,880	106,320	93,450	88,450	96,956
Kabupaten Ngawi	94,103	96,052	102,945	120,175	71,352	96,925
Kabupaten Pacitan	95,410	98,729	107,672	118,741	95,591	103,229
Kabupaten Ponorogo	95,407	101,505	103,652	119,007	88,845	101,683

Rasio efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki tingkat efisien yang berbeda-beda. Ada yang efisien dan ada yang tidak efisien. Apabila hasil rasio menunjukkan kurang dari 100%, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dapat dikatakan efisien. Semakin kecil tingkat rasio efisiensi yang dihasilkan, maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun semakin baik.

3.4 Rasio Keserasian

Tabel 4. Rasio Keserasian

Kabupaten/Kota	Rasio Belanja Operasi (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	66,945	61,978	61,330	65,307	61,781	63,469

Kota Madiun	51,368	50,655	45,340	52,142	38,960	47,693
Kabupaten Magetan	71,695	67,360	67,807	67,370	63,169	67,480
Kabupaten Ngawi	69,369	68,610	66,285	66,826	69,226	68,063
Kabupaten Pacitan	66,920	66,313	61,051	66,452	59,749	64,097
Kabupaten Ponorogo	71,021	67,192	68,381	68,305	60,186	67,017

Kabupaten/Kota	Rasio Belanja Modal (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	18,226	20,729	24,198	17,850	16,757	19,552
Kota Madiun	23,613	20,794	23,886	47,858	24,171	28,064
Kabupaten Magetan	13,848	15,078	16,157	12,256	11,687	13,805
Kabupaten Ngawi	15,391	17,054	17,454	15,940	15,854	16,339
Kabupaten Pacitan	16,666	19,039	23,054	33,548	17,441	21,949
Kabupaten Ponorogo	10,881	17,107	17,918	17,654	19,565	16,625

Rasio keserasian menggambarkan Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan mengalokasikan dana yang dimiliki pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal). Semakin tinggi persentase dana yang digunakan untuk belanja rutin (belanja operasi), maka semakin kecil belanja pembangunan (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat, dan sebaliknya.

3.5 Rasio Pertumbuhan PAD

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan PAD

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan PAD (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	45,503	23,262	9,361	47,856	-10,076	23,181
Kota Madiun	40,175	22,363	5,195	33,118	0,284	20,227
Kabupaten Magetan	60,669	16,578	0,640	27,874	-6,976	19,757
Kabupaten Ngawi	97,623	12,958	2,323	33,534	-40,858	21,116

Kabupaten Pacitan	60,785	24,855	18,993	34,310	-8,381	26,112
Kabupaten Ponorogo	48,199	6,021	13,961	28,072	-3,534	18,544

Rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan APBD Pemerintah Daerah mengalami pertumbuhan atau tidak. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun mengalami pertumbuhan PAD yang berbeda-beda. Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif, apabila nilai total pendapatan daerah, PAD, dan Belanja Modal semakin tinggi, maka Belanja Operasi semakin rendah. Sebaliknya, pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif, apabila nilai total pendapatan daerah, PAD, dan Belanja Operasi semakin tinggi, maka Belanja Modal semakin rendah.

3.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	67,042	62,716	74,502	67,169	70,368	68,359
Kota Madiun	64,486	61,321	71,880	4,804	67,678	54,034
Kabupaten Magetan	64,773	63,795	74,290	70,798	70,586	68,859
Kabupaten Ngawi	66,288	60,900	74,231	71,033	76,585	69,807
Kabupaten Pacitan	64,121	60,530	71,172	3,184	71,759	54,153
Kabupaten Ponorogo	64,504	61,295	71,840	64,714	67,960	66,063

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Sebaliknya, semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa tingginya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai kegiatan/program pembangunan daerah tersebut.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2108 memiliki tingkat ketergantungan daerah pada tingkat sedang, kecuali Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 tingkat ketergantungan daerah pada tingkat rendah sekali serta Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 tingkat ketergantungan daerah pada tingkat tinggi.

3.7 Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tabel 7. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Kabupaten/Kota	Rasio Dearajat Kontribusi BUMD (%)					Rata-rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kabupaten Madiun	2,839	2,871	2,919	2,273	2,652	2,711
Kota Madiun	7,001	6,767	6,449	5,776	5,779	6,354
Kabupaten Magetan	2,045	1,419	1,372	1,068	1,304	1,441
Kabupaten Ngawi	5,182	4,728	4,745	3,606	6,162	4,885
Kabupaten Pacitan	2,304	1,915	1,612	1,207	1,343	1,676
Kabupaten Ponorogo	0,496	0,475	0,427	0,338	0,351	0,417

Rasio derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung penerimaan pendapatan daerah. Jika hasil rasio menunjukkan angka di atas 0%, maka perusahaan daerah memiliki kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Semakin tinggi hasil rasio derajat kontribusi BUMD, maka semakin besar tingkat kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Rasio derajat kontribusi BUMD menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memperoleh kontribusi dari perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah, kecuali pada

Kabupaten Ponorogo tahun 2014 hingga tahun 2018 kurang memperoleh kontribusi dari perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan daerahnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali dan dengan pola hubungan instruktif, yaitu dimana Pemerintah Pusat memiliki peran yang dominan terhadap Pemerintah Daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah. (2) Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif, kecuali Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas yang kurang efektif. (3) Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki tingkat efisien yang berbeda-beda. Ada yang efisien dan ada yang tidak efisien. Dalam waktu 5 tahun, masing-masing kabupaten/kota eks karesidenan Madiun setidaknya minimal 2 tahun mengalami kondisi yang tidak efisien. (4) Rasio Keserasian menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dalam menggunakan alokasi dana yang dimiliki lebih besar digunakan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. (5) Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun mengalami pertumbuhan PAD yang berbeda-beda. Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif. (6) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memiliki tingkat ketergantungan daerah pada tingkat sedang, kecuali Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 tingkat ketergantungan daerah pada tingkat rendah sekali serta Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 tingkat ketergantungan daerah pada tingkat tinggi. (7) Rasio Derajat Kontribusi BUMD menunjukkan bahwa

Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2014 sampai tahun 2018 memperoleh kontribusi dari perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah, kecuali pada Kabupaten Ponorogo tahun 2014 hingga tahun 2018 kurang memperoleh kontribusi dari perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan daerahnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: (1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah, seperti rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio DSCR (Dept Service Coverage Ratio), sehingga ragam penelitian menjadi lebih luas. (2) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi dan tahun anggaran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.

Hariyanti, Dini., Marheni., Yenfi. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota PangkalPinang Tahun Anggaran 2010-2015 (Studi Kasus Pada Pemda Kota PangkalPinang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis & Keuangan (JIABK)*, Volume 10, Nomor 2. ISSN: 2355-9047.

H.R. Pangkey, Aldy., S.Saerang, Ivone.,E.Tulung, Joy. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2*. ISSN: 2303-1174.

Kusumawati, Eny., Trisnawati, Rina., Achyani, Fatchan. 2018. *Analisis Laporan Keuangan (Tinjauan Kasus dan Riset Empiris)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.

- Mahsun, M. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Munir, Dasril., Djuanda, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPA.
- Nelwan, M., Aisah, I.S. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 43 No. 2*. ISSN: 2614-025X.
- Nurul Fathah, Rigel. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK ▪ Vol.8 ▪ No. 1*. ISSN: 2442 – 4439.
- Rahayu, Sri., Wahyudi, Ilham., Yudi. 2009. Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi di lihat dari Perspektif Akuntabilitas. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 11 Nomor 2*. ISSN: 0852-8349.
- Rahmayati, Anim. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1*. ISSN: 2503-3565.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 33/PB/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryantini, Ni Putu Santi., Darmayanti, Ni Putu Ayu., Candradiningrat, I.R. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Prosiding Seminar Nasional AIMI*. ISBN: 978-602-98081-7-9.
- Syamsudin dan Damiyanti. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.